

PEMAHAMAN NORMA BERLALU LINTAS PADA SISWA SMAN 7 DAN SMKN 5 BANJARMASIN

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Azrianoor Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Azrianoor. 2014. Passed understanding Norma Cross In SMK Students of SMAN 7 and SMKN 5 Banjarmasin. Thesis, Program Study of Citizenship and Pancasila Education, Department of Social Science Education, Faculty of Teacher Training and Education Science, University of Lambung Mangkurat. Counselor (I) Zainul Akhyar, (II) Harpani Matnuh.

In this study examines the Passed Cross In SMK Students of SMAN 7 and SMKN 5 Banjarmasin. The purpose of this study to determine the background of students' understanding of the requirements to be allowed to use motor vehicles, motor driving ordinance, penal sanctions for violations of traffic rules and the impact of violations of traffic rules on the road.

The method used is a qualitative method of data capture techniques through observation, interviews, focus group discussions (FGD), and documentation of the data sources were selected purposively. Testing the validity of the data can improve through perseverance, triangulation, and using reference materials.

The Results showed students' understanding of the requirements to be allowed to use motorized vehicles for knowledge of traffic laws still do not understand, the omission of a police presence, absence by the school, and the presence of omission by the parents. The procedure for motor drive system is the lack of understanding and knowledge of how to drive motorized traffic rules, patterns of behavior or attitude in driving a motorcycle, provide socialization and appeal to the public, held a routine patrol, raid gear motorcycle standards and prohibitions for junior high school students to use bicycles motors. Penal sanctions for violations of traffic rules by the bad behavior of motorists who often do, and exposed to legal sanctions traffic rules. The impact of traffic rules violation on the highway is not orderly traffic, and an increase in accidents involving students.

Based on the results of research to realize a student who obey the law for orderly traffic, traffic cop Sat Banjarmasin So should conduct a more intensive dissemination of the laws of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 on traffic and highway transportation for students, should all the parties concerned work together to address the problems of traffic norms neighbors, and students are expected to provide instances neighbor traffic rules, especially students PPKn course in dealing with various problems faced by the students about traffic norms and regulations.

Keywords: Elapsed Understanding Cross, Student.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, khususnya di bidang transportasi telah membawa pesatnya pertumbuhan sarana transportasi baik udara, laut dan darat yang menyebabkan semakin padatnya arus lalu lintas. Pesatnya pertumbuhan transportasi dan padatnya arus lalu lintas harus pula diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat dalam berlalu lintas secara nyaman dan aman serta keselamatan berlalu lintas.

Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa; "lalu lintas adalah gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan". Djajosmon (1976 : 8) mengatakan bahwa :

Selanjutnya pasal 3 menegaskan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk tercapainya tujuan berlalu lintas yang tertib, aman dan nyaman, UU RI No 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang berlalu lintas. Dilanjutkan dengan pasal 107 ayat 2 menyatakan bahwa setiap pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Dan setiap pengendara harus memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas (Suryajaya, 1995: 19).

Hal ini banyak siswa SMA di kota Banjarmasin yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas dan kurangnya pemahaman norma berlalu lintas. Seperti melanggar lampu rambu-rambu lalu lintas atau menerobos lampu merah,

mengendarai motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), boncengan tidak menggunakan helm, tidak menyalakan lampu di siang hari, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara. Demikian juga masalah kemacetan lalu lintas sering kali disebabkan oleh karena adanya pelanggaran oleh pemakai atau pengguna jalan, seperti volume jumlah kendaraan yang melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang memadai, dan lain-lain. Tingginya aktivitas atau volume arus lalu lintas diimbangi oleh kapasitas jalan yang ada, terutama pada jam-jam sibuk di mana aktivitas masyarakat mulai meningkat. Oleh karena pemahaman norma berlalu lintas pada siswa SMA mempunyai dampak yang besar sesuai dengan kondisinya semakin hari semakin meningkat, hingga diperlukan suatu strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang lebih efektif dan lebih baik. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman norma hukum siswa dalam berlalu lintas.

Begitupun dengan permasalahan yang ditinjau untuk penelitian oleh penulis di laporkan dalam skripsi ini, Pemahaman Norma berlalu lintas pada siswa SMA di kota Banjarmasin. Kenyataan yang terjadi di kota Banjarmasin, (Lihat Anatomi Data Laka Tahun 2012 di kota Banjarmasin), Berdasarkan data yang diperoleh pada Polresta Banjarmasin dengan Kepala Laka Lantas Bapa Soekarno sebagai berikut: Angka korban kecelakaan dari tahun 2011 ke 2012 meningkat yaitu 53 orang menjadi 66 orang dengan kisaran umur 16-30 tahun. Jumlah laka keseluruhan yaitu 66 laka tahun 2012 dari bulan januari sampai dengan oktober, yang terdiri dari jenis kendaraan yang terlibat (R4/lebih dan R2), jenis laka murni, Identitas korban/pelaku yaitu: Swasta, Pelajar, Sopir, Polri, PNS, IRT, Mahasiswa, Wirawisata, Tunawisma, Purnawirawan TNI, dan Sopir. Menurut angka kecelakaan lalu lintas di Banjarmasin sampai dua bulan terakhir ini banyak kecelakaan terjadi di kota Banjarmasin semua itu dilakukan oleh pelajar.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pemahaman norma berlalu lintas pada siswa SMA di kota Banjarmasin merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan

peraturan lalu lintas, pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap tentang peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada seluruh siswa selaku salah satu pengguna jalan raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan siswa yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap siswa maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemahaman

Menurut W.J.S Poerwodarminto (1994: 496) dalam kamus Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata "Paham" yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Definisi di atas, tidak bersifat operasional, sebab tidak memperlihatkan perbuatan psikologis yang diambil seseorang jika ia memahami. Maka arti pemahaman yang bersifat operasional adalah diartikan sebagai melihat suatu hubungan ide tentang suatu persoalan. Sesuatu itu dipahami selagi fakta-fakta mengenai persoalan itu dikumpulkan. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan pemahaman akan dapat mencapai pengetahuan prosedur.

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan" (KBBI, 1993 : 636). Dalam hal ini pemahaman dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan tujuan pembelajaran. Suharsimi (2009 : 118) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan

memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

2. Pentingnya Pemahaman Norma Berlalu Lintas

Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan disekeliling daerah menjadikan kita miris, bagaimana tidak ancaman kehilangan jiwa ada didepan mata jika tidak menggubris atau menjalankan pemahaman norma dalam berlalu lintas. Sepatutnya sadar akan bahaya tersebut untuk kemudian mulai berhati-hati dalam menggunakan jalan, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi kesadaran seperti ini saja tidak cukup, pemerintah mustinya mulai berfikir untuk mengevaluasi semua ini. Jika perlu wawasan dan pemahaman akan pentingnya etika dalam berlalu lintas dimasukan dalam materi pembelajaran disekolah-sekolah sejak dini.

Nampaknya falsafah jawa yang mengatakan "Alon-alon waton klakon" senyatanya telah terbukti. Yang lebih jelasnya adalah segala sesuatu harusnya dijalankan dengan penuh kehati-hatian dalam segala hal termasuk berlalu lintas. Dalam budaya jawa memang prinsip tersebut sangatlah penting karena jika dibenturkan dengan perilaku masyarakat sekarang dalam memakai jalan sangat memperhatikan. Disamping kondisi jalan, kepemilikan SIM yang tidak semestinya dan juga perangkat rambu-rambu yang tidak berfungsi lagi juga mempengaruhi.

Dalam jurnal Gemari edisi 112/ tahun XI/ Mei 2010, Ki Sugeng Subagyo mengatakan bahwa "kesadaran akan berlalu lintas harus ditanamkan sejak dini, caranya dengan memberikan teladan dan pemahaman kepada siswa, untuk itu diperlukan sosok teladan yang senantiasa dapat memberikan contoh yang baik bagi murid-muridnya dalam beretika di jalan". Beliau merujuk kepada ucapan Ki hajar Dewantara yang mengatakan bahwa hakikat pembelajaran adalah nitheni, nirokke dan nambahi. Yang dalam bahasa sederhananya adalah pentingnya factor keteladanan. Artinya sebagai seorang pendidik harus benar-benar sadar akan pentingnya etika berlalu lintas di jalan.

Dari itu diharapkan akan ada semacam transformasi kesadaran kepada anak didik untuk mengikuti mereka dalam hal taat kepada aturan lalu lintas, seperti tidak ugal-ugalan, kebut-kebutan dan atau melanggar marka jalan yang dari itu semua dapat membahayakan keselamatan orang lain. Output seperti inilah yang diharapkan dari pendidikan karakter tentang berlalu lintas, tidak lain agar siswa/ anak didik dapat mengerti, merasakan dan melaksanakan aturan-aturan, etika dan sopan santun dalam berkendara di jalan raya.

Dicermati memang benar apa yang dikatakan oleh wakil ketua majelis ibu Pawiyatan taman siswa Yogyakarta ini. Kesadaran dalam berlalu lintas seyogyanya ditanamkan kepada siswa atau anak sejak dini. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan penyadaran terhadap mereka dan efek jangka panjangnya akan dapat menekan tingkat kecelakaan di jalan raya karena semua element masyarakat mulaiberhati-hati, peduli kepada diri sendiri dan orang lain di jalan. Namun demikian pemerintah juga harus segera melakukan perbaikan terhadap system transportasi di Negara ini, memperbaiki kerusakan-kerusakan sarana transportasi, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat melalui aparatnya agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas. ada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak usia dini dalam hal ini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Sejak dipublikasikannya hasil-hasil riset mutakhir di bidang neuroscience dan psikologi maka fenomena pentingnya pendidikan terhadap anak merupakan keniscayaan. pendidikan terhadap anak menjadi sangat penting mengingat potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang terbentuk pada rentang usia ini. Sedemikian pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut the golden age (usia emas).

3. Peraturan Tentang Berlalu Lintas

Peraturan lalu lintas, dalam hal ini Achmad Sanusi (1984 : 229) mengemukakan bahwa "kesadaran hukum yang rendah cenderung pada pelanggaran hukum dengan berbagai

kemungkinan korban dan kerugian yang dideritanya, makin rendahnya kesadaran hukum makin banyak pelanggaran dan makin besar pula korbannya". Kesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai. Usaha tersebut adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan mengingat adanya kecenderungan perilaku melawan atau melanggar hukum yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1. Peraturan Lalu Lintas bagi Pengendara Sepeda Motor

- a. Dilarang mendengarkan musik saat mengendarai Motor (agar pengguna motor bisa mendengarkan klakson dan lainnya).
- b. Dilarang menerima telepon saat mengendarai Motor (agar pengguna motor fokus dalam mengendarai motor, tidak oleng).
- c. Dilarang merubah Warna Motor dan harus sesuai dengan Warna di STNK.
- d. Bagi Pengendara Motor, Nama di STNK dan SIM harus sesuai dengan Nama yang bersangkutan, apabila Beda dan belum Balik Nama akan didenda sebesar Rp 500.000.
- e. Wajib menyalakan Lampu pada siang dan malam hari (karena makin ramainya pengguna motor yang terkadang suka salip jadi bisa sebagai pertanda bagi pengguna motor/mobil yang lawan arah pada siang hari).
- f. Dilarang Merokok saat mengendarai Motor (agar pengguna motor fokus/konsentrasi dengan motornya).
- g. Dilarang Merubah Plat Motor.
- h. Dilarang memakai/menggunakan Lampu yang berwarna (merah, hijau, kuning, putih), lampu harus sesuai Standar Pabrik (agar lebih tertib).

2. Perlengkapan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas Dan Angkutan Jalan. Maka perlengkapan kendaraan bermotor antara lain:

1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor (Pasal 57 Ayat (1)).

2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pasal 57 Ayat (2) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.

3) Pengemudi sepeda motor diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (diatur Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

4) Pengemudi roda empat/lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca. Pasal 285 Ayat (2) mengatur, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500.000.

5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas.

- Pengendara
 - a. Memakai helm SNI
 - b. Memiliki SIM
 - c. Memakai Jaket
 - d. Memakai Sarung Tangan
- Alat Kelengkapan Kendaraan Bermotor
 - a. Kaca Spion
 - b. Klakson
 - c. Lampu Utama
 - d. Lampu Rem
 - e. Lampu Penunjuk Arah
 - f. Alat Pengukur Kecepatan
 - g. Pentil Ban

3. Pasal-pasal yang bersangkutan

a. Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI), Jangan lagi kenakan helm batok. Gunakanlah helm SNI. Selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm jenis ini sudah menjadi kewajiban seperti diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8). Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

b. Perlengkapan Kendaraan Bermotor, Bagi para pengendara roda empat atau lebih, coba pastikan kelengkapan berkendara Anda. UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K. Bagaimana jika tak dipenuhi? Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278.

c. Tak Punya SIM Denda Rp 1 Juta, Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, UU Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara. Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

d. Konsentrasi dalam Berkendara, Pasal 283 UU Lalu Lintas mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan

paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000.

e. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda, Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

4. Ketertiban Lalu Lintas

a. Memiliki STNK, Setiap bepergian jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. Jika Anda lupa membawanya, sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 Ayat (1)).

b. Memiliki SIM, Pasal 288 Ayat (2) mengatur bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.

c. Pengemudi atau penumpang tanpa sabuk pengaman, Sanksinya sama. Ini harus jadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Jangan lupa mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan Anda. Selain untuk keselamatan, juga untuk menghindari sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 seperti diatur dalam Pasal 289.

d. Nyalakan lampu utama pada malam hari, Saat berkendara pada malam hari pastikan lampu utama kendaraan Anda menyala dengan sempurna. Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293).

e. Wajib nyalakan lampu pada siang hari, Para pengendara motor yang berkendara pada siang hari diwajibkan menyalakan lampu utama. Sekarang, sudah bukan sosialisasi lagi.

Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.

f. Berbelok, Berbalik Arah, Jangan lupa lampu isyarat. Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000.

g. Jangan sembarangan pindah jalur para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda Rp 250.000 (Pasal 295).

h. Stop belok kiri tak boleh langsung, Ini salah satu peraturan baru dalam UU Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut "Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas".

i. Balapan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta. Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama setahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297).

j. Sesuaikan jalur dengan kecepatan, Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah: (1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri (2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri (3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah,

mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan. (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.

Aturan-aturan baru yang diterapkan di UU Lalu Lintas yang baru ini harus menjadi perhatian bagi para pengendara. Selain demi keselamatan, tentunya juga untuk menghindari merogoh kocek cukup dalam karena ditilang. Sanksi denda yang dikenakan lumayan besar jika dibandingkan dengan UU yang lama. Yang terpenting semua peraturan itu demi keselamatan dan keamanan diri, jangan taati peraturan karena takut ditilang polisi tapi memang untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri dari kecelakaan dan sebagainya.

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena permasalahan yang diteliti pada penelitian pemahaman norma berlalu lintas pada siswa SMAN 7 dan SMKN 5 lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dandata yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan peneliti terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan sehari-hari para siswa pergi kesekolah menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya.

3. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan serta wawancara langsung dengan responden yaitu kepala Laka Lantas di Polresta Banjarmasin, Siswa SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin dan melakukan Focus

Group Discussion (FGD) dengan Siswa. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang perwakilan siswa dari SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin untuk melaksanakan Focus Group Discussion.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti perlu mengetahui bagaimana pemahaman siswa terhadap norma berlalu lintas di jalan raya, dimana yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Sat Lantas Polresta Banjarmasin dan Siswa SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin. Selain itu peneliti juga melibatkan Siswa SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan kepustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam bagian ini diuraikan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi.

7. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, seorang peneliti dapat melakukan triangulasi, triangulasi disini adalah bentuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi atau tempat penelitian adalah kota Banjarmasin. Alasan memilih tempat ini adalah karena wilayah ini memiliki banyak SMA yang letaknya berada sangat dekat dengan jalan raya provinsi yaitu SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin, berbeda dengan kabupaten lain di provinsi Kalimantan Selatan yang sekolahnya berada jauh dengan jalan raya Provinsi. Karena SMAN 7 Banjarmasin terletak di jalan Dharma Praja berada dekat dengan jalan A. Yani KM.5 yang kebanyakan lalu

lalang arus lalu lintas sedangkan SMKN 5 Banjarmasin berada di jalan Sutoyo.S yang sering rawan terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan siswa SMKN 5 Banjarmasin. Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti untuk memperoleh data dan wawancara dengan kepolisian setempat pada tanggal 17 Maret 2012 di kota Banjarmasin sebagian besar pelajar SMA/K dan SMP menggunakan sepeda motor, sering terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman siswa dalam berlalu lintas. Seiring bertambah jumlah kendaraan, menyebabkan arus lalu lintas semakin padat yang menyebabkan kontrol emosi pengguna jalan menghiraukan aturan berlalu lintas.

Di kota Banjarmasin memiliki dua sekolah dengan tingkat menengah atas yang terletak dekat dengan jalan provinsi, yaitu SMAN 7 Banjarmasin dan SMKN 5 Banjarmasin. Pada mulanya SMAN 7 Banjarmasin adalah SMU N 7 Plus Banjarmasin. Sedangkan SMKN 5 Banjarmasin didirikan pada tahun 1978. Siswa siswinya selain berasal dari kecamatan Banjarmasin Barat juga berasal dari kecamatan tetangga seperti kecamatan Banjarmasin Selatan, kecamatan Banjarmasin Tengah dan kecamatan Banjarmasin Timur. Seperti yang telah disebutkan di atas jarak terdekat ibu kota kecamatan dengan desa di sekitar adalah 2 km, maka para siswa harus menempuh perjalanan jauh ketika melanjutkan ke sekolah, yaitu ada yang berjarak 10 km. Bahkan jika dari kecamatan Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Selatan 5 km, sedangkan kecamatan Banjarmasin Timur jarak 7 km.

2. Pemahaman Siswa Terhadap Syarat-syarat Untuk diperbolehkan Menggunakan Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Kewajiban Memiliki Surat Izin Mengemudi telah disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi (SIM). Dengan melihat peraturan perundangan tersebut maka dapat diketahui bahwa orang yang yang

tidak memiliki SIM tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor dengan jenis apapun.

Ternyata masih ada siswa sekolah baik SMA maupun SMK yang belum memiliki SIM namun mereka tetap mengendarai sepeda motor dan melalui jalan raya tanpa memiliki SIM. Penyebab hal tersebut karena pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas masih kurang paham, adanya pembiaran dari polisi, adanya oleh pihak sekolah, dan adanya pembiaran oleh orang tua.

3. Pemahaman Siswa Terhadap Tata Cara Berkendara Bermotor di Jalan Raya

Menurut Direktorat Lalu Lintas Polri Tata Cara Berkendara Bermotor dan Berlalu Lintas di jalan raya yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a) Berprilaku tertib dan/ atau
 - b) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- 2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a) Rambu-rambu lalu lintas
 - b) Marka jalan
 - c) Alat pemberi isyarat lalu lintas
 - d) Gerakan lalu lintas
 - e) Berhenti dan paker
 - f) Peringatan dengan bunyi dan sinar
 - g) Kecepatan maksimal atau minimal; dan / atau
 - h) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.
- 3) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pengemudi kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a) Surat tanda nomor bekendraan bermotor (STNK) atau surat tanda coba kendraan bermotor (STCK)
 - b) Surat izin mengemudi (SIM)
 - c) Bukti lulus uji berkala
 - d) Tanda bukti lain yang sah.
 - e) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

- f) Setiap pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah jalan dan penumpang yang duduk wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- g) Setiap orang yang mengendarai dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia
- h) Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang (NN, 2012: 1)

Berdasarkan tata cara yang diberikan oleh kepolisian tersebut wajib dipatuhi oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Demikian pula juga disebutkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 Pasal 106 ayat 5 yang menyebutkan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b) Surat Izin Mengemudi (SIM)
- c) Bukti lulus uji berkala, dan/atau
- d) Tanda bukti lain yang sah.

Dalam pasal 77 ayat 1 Undang-undang No 22 tahun 2009 disebutkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Menurut pasal 1 angka 2 PP No.42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, razia atau pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan syarat teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.

Siswa sebagai pengguna jalan raya harus mentaati aturan-aturan hukum berlalu lintas yang mengaturnya. Kesadaran Siswa SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin akan timbul jika adanya suatu tindakan tegas dari instansi terkait terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Melalui aturan-aturan hukum berlalu lintas ini maka ketertiban berlalu lintas di dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Namun pada

kenyataannya masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki kemampuan penguasaan teori dan praktek dengan baik, ditambah dengan kesadaran para pengendara bermotor yang rendah sehingga setiap hari semakin banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa manusia itu sendiri. Penyebab hal tersebut karena kurangnya pemahaman tata cara berkendara bermotor dan pengetahuan aturan berlalu lintas, pola perilaku atau sikap dalam mengemudi sepeda motor, memberikan sosialisasi dan himbauan pada masyarakat, mengadakan patroli rutin, razia perlengkapan standar sepeda motor, dan larangan bagi pelajar SMP menggunakan sepeda motor.

4. Pemahaman Siswa Terhadap Sanksi Hukum Pelanggaran Aturan Berlalu Lintas

UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diteken Presiden pada 22 Juni 2009, ada sejumlah ancaman sanksi kurungan atau denda. Berikut ini beberapa perilaku buruk atau pelanggaran yang sering dilakukan bikers saat di jalan dan sejumlah sanksinya.

- 1. Saat di lampu merah, menerabas garis putih dan zebra cross. (Pasal 287, kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu).
- 2. Saat di lampu merah, menerabas, bergerak sebelum lampu hijau. (Pasal 287, kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu).
- 3. Menggunakan trotoar sebagai jalan pintas di tengah kemacetan.
- 4. Menggunakan knalpot bersuara bising. (Pasal 285 ayat (1) kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu).
- 5. Menyalip dari kiri jalan tanpa memperhatikan kendaraan lain. (Pasal 300, kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu).
- 6. Berbelok tanpa menyalakan lampu sign. (pasal 294 menegaskan, ancaman pidana penjara satu bulan atau denda Rp 250 ribu).

7. Berboncengan lebih dari dua orang. (pasal 292, kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu).
8. Membunyikan klakson yang memekakan telinga, terlebih di tengah kemacetan.
9. Saat hujan deras, berteduh di bawah kolong jembatan secara bergerombol yang memakan ruas jalan.
10. Berkendara dengan kecepatan tinggi di tengah keramaian lalu lintas jalan raya. (pasal 287 ayat (5) kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu).
11. Berkendara sambil merokok.
12. Berkendara sambil menelepon atau sms. (Pasal 283, kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu).
13. Berkendara membawa anak kecil di bagian depan dan belakang. (pasal 292, kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu).
14. Aksi balapan liar di jalan umum. (Pasal 297, kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3 juta).
15. Berkendara sambil menggunakan earphone untuk mendengarkan musik keras keras.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan berlalu lintas dengan perilaku buruk yang sering di lakukan SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin, dan terkena sanksi hukum aturan berlalu lintas

5. Pemahaman Siswa Terhadap Dampak Pelanggaran Tata Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya

Salah satu dari tujuan lalu lintas adalah adanya ketertiban lalu lintas, dengan adanya ketertiban maka diharapkan akan tercipta keamanan dalam berkendara di jalan raya. Adanya ketidaktertiban di jalan raya serta adanya ugal-ugalan para pengguna jalan tentunya akan sangat membahayakan pengemudi lain. Disebutkan dalam pasal 106 ayat 1 UU RI No. 22 tahun 2009 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

Ternyata dengan adanya siswa SMAN 7 dan SMKN 5 Banjarmasin yang mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM dan yang melanggar norma berlalu lintas menimbulkan dampak kecelakaan yang tidak hanya

menyebabkan kerugian materil, namun juga hilangnya nyawa. Penyebab hal tersebut karena tidak tertib lalu lintas, dan meningkatnya kecelakaan yang melibatkan pelajar. Jika kita melihat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan keatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan diselenggarakannya lalu lintas seperti keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran belum tercapai.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
 - a. Pemahaman Siswa terhadap syarat-syarat untuk diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya, ketika siswa pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM belum mematuhi kewajiban persyaratan teknis dan laik jalan dan karena adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya pengetahuan tentang undang-undang lalu lintas, belum teruji kompetensinya dalam mengemudi, kesadaran berlalu lintas belum sepenuhnya dimiliki oleh siswa, dan adanya pembiaran oleh orang tua.
 - b. Pemahaman Siswa terhadap tata cara berkendara bermotor di jalan raya, ternyata pola perilaku mereka di jalan raya masih kurang tertib dan baik di karenakankurangnya pemahaman tata cara berkendara bermotor dan pengetahuan aturan berlalu lintas, belum terlalu paham larangan dan keamanan berkendara di jalan raya.

- c. Pemahaman Siswa terhadap sanksi hukum pelanggaran aturan berlalu lintas, melalui pemahaman aturan-aturan sanksi hukum berlalu lintas ini maka ketertiban berlalu lintas di dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Namun pada kenyataannya masih banyak siswa menggunakan kendaraan bermotor yang tidak memiliki kemampuan penguasaan teori dan praktek dengan baik, ditambah dengan kesadaran para
 - d. Pemahaman Siswa terhadap dampak pelanggaran tata tertib pengendara bermotor yang rendah sehingga setiap hari semakin banyak terjadi pelanggaran lalu lintas yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian baik materi maupun jiwa siswa itu sendiri. berlalu lintas di jalan raya dapat mengendarai sepeda motor ketika pergi ke sekolah tanpa memiliki SIM dan mematuhi ketentuan serta minimnya kesadaran siswa terhadap aturan-aturan berlalu-lintas adalah tidak tertib lalu lintas dan ugal-ugalan di jalan raya yang menyebabkan meningkatnya kecelakaan yang melibatkan pelajar.
2. Saran
 - a. Bagi Pelajar
Hendaknya mewujudkan siswa yang taat pada hukum dan cinta kepada Negara dengan menumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri untuk tertib berlalu lintas agar terciptanya sebuah keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
 - b. Bagi Kepolisian
Polantas Banjarmasin hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya pada siswa di kota Banjarmasin.
 - c. Bagi Masyarakat
Sebaiknya seluruh pihak yang terkait saling bekerjasama dan berkomunikasi untuk menanggulangi permasalahan. Karena jika hanya salah satu pihak yang berusaha menyelesaikannya dan tidak diiringi pihak lain maka kecil kemungkinan berhasil.

- d. Bagi Mahasiswa
Diharapkan mahasiswa dapat memberikan contoh tentang tata tertib berlalu lintas khususnya mahasiswa program studi PPKn dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi siswa tentang Norma dan Peraturan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khan, Shafique. 2005. Filsafat Pendidikan Al-Ghazali, Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dep. Pend. Dan Kebudayaan, 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hariwijaya, M. 2007. Metodologi dan teknik penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Yogyakarta: elMatera Publishing.
- <http://frenndw.wordpress.com/2011/03/15/teknik-pengumpulan-data-wawancara-dan-fgd-forum-group-discussion/>, diunduh 5 mei 2012
- <http://pdipmkotabandung.blogspot.com/2010/02/pengertian-pelajar.html>, diunduh 16 april 2012
- Koentjaraningrat. 1990. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Maskat, Djunaidi. 1996. Pengetahuan Praktis Berlalu-lintas Di Jalan Raya, Surabaya: CV Sibaya.

- Naning, Ramdlon. 1983. Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakkan Hukum Lalu-lintas, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- NN. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, DITLANTAS BABINKAM POLRI, Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1983. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali Pers.
- Suryajaya. 1995. Aman dan Nyaman di Jalan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahyu. 2009. Materi Kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Banjarmasin. FKIP Unlam (dicetak untuk kalangan terbatas).
- Wahyu. 2011. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Banjarmasin: UNLAM
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori & Proses (edisi Revisi). Jogjakarta: Media Pressindo.
- W.J.S Purwadarminta. 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Heri, P. 1999. Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan. Jakarta: EGC.
- Tyler, Saleh. R. 2004. Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Simposium Nasional Akuntansi VII. Pp.897-910.
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi Hal.358.
- Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum: Apakah itu hokum ?, cetakan kelima, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hal 1.
- Poerwodarminto WJS. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.
- Djajosmon, H S. 1976. Polisi dan Lalu Lintas. Dinas Hukum Polri. Jakarta.
- Achmad Sanusi, 1984. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: Taruito.
- Otje Salman, 1989. Sosiologi Hukum dan Pola Perilaku Hukum. Bandung: Armico.
- Suharsimi, Arikunto. 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Ki Sugeng Subagyo, 2010. Kesadaran dan Pemahaman Norma Berlalu Lintas. Yogyakarta: Permendagri.
- Ade, Andriyana. 2013. Pelanggaran-pelanggaran Dalam berlalu Lintas. Jakarta: Balai Pustaka.
- Irwanto, Koentjoro. 2006. Focus Group Discussion. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.